

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Faktor Terjadinya Konflik Maluku 1999-2002

Untuk menghilangkan peran pemerintah NKRI sebagai penyebab konflik Maluku, maka skenario yang dilakukan untuk menjadi anggapan umum seakan-akan yang menjadi penyebab konflik Maluku adalah (1) sebagai akibat dari kenakalan remaja atau kriminal murni, (2) karena kecemburuan sebagai akibat penempatan pegawai pada instansi tertentu yang hanya memperhatikan kelompok tertentu, (3) upaya PDIP untuk memenangkan PEMILU, (4) karena kecemburuan sosial dari penduduk asli yang beragama Kristen karena para pendatang yang beragama Muslim memiliki tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi, (5) karena konflik antar umat beragama, (6) karena upaya integrasi yang dilakukan oleh RMS dalam rangka disintegrasi. Dengan cara itu, maka rakyat dihasut/diprovokasi sedemikian rupa sehingga rakyat tidak memiliki pilihan lain selain berperang melawan kelompok yang lain seakan-akan demi mempertahankan eksistensinya.

5.1.2 Pelaksanaan Perjanjian Malino Terhadap Konflik Maluku 1999-2002

Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekedar pernyataan atau deklarasi. Perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua

kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian Malino I yang hanya mengikat dua pihak, yaitu Islam-Kristen Sulawesi Tengah, tetapi perjanjian Malino II dibuat bersama dan mengikat tiga pihak yaitu Islam-Kristen Maluku serta pemerintah.

5.1.3 Dampak Perjanjian Malino Bagi Masyarakat Maluku

Masyarakat Maluku bersatu membangun Maluku ke depan karena Maluku telah ketinggalan padahal Maluku ini punya potensi yang sangat besar, Masyarakat Maluku mesti membangun Maluku yang tidak diporandakan oleh orang-orang yang seenaknya mau mendapat kekuasaan lalu bikin hancur. Dengan demikian upaya untuk tetap menumbuhkan dan memperkuat integrasi sosial di kalangan masyarakat Maluku adalah merupakan bentuk kewaspadaan yang dilakukan untuk menjaga persatuan. Kewaspadaan dan menjaga persatuan menunjukkan pada suatu yang dinamis yakni melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata yang mesti dilakukan.

Tidaklah terlalu sulit bagi masyarakat Maluku untuk melakukan integrasi, hal ini karena nilai-nilai budaya masyarakat Maluku dalam bentuk *pela*, *gandong*, *duan lolat*, *maano* dan sebagainya adalah bentuk-bentuk integrasi yang telah dilakukan sejak leluhur, diwariskan, dipertahankan dan dilaksanakan sampai saat ini dan pada waktu-waktu mendatang. Di dalam *pela* ada solidaritas dan kerelaan untuk berkorban dan telah menjadi

panggilan jiwa bagi mereka (masyarakat Maluku) yang ada dalam hubungan pela itu, begitu pula hubungan gandong dan sebagainya.

5.2 Saran

Sejarah bagian dari sebuah pembelajaran yang akan menjawab semua pertanyaan mengenai masa lalu, kini dan akan datang. Konflik Maluku selalu menjadi sebuah peristiwa yang harus kita pelajari dan pahami bersama, dengan demikian kita mengetahui kita ketahui bagaimana sebuah dominasi yang terjadi saat ini. Tidak ada yang mungkin dengan Mamluku yang saat ini seakan menjadi pusat laboraterium perdamaian. Semuanya dapat dijelaskan secara logis jika kita memahami sejarah. Maluku yang dijuluki sebagai provinsi perairan se-indonesia ini dengan berbagai macam ragam budaya dan bahasa yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Kita akan tahu bagaimana sebuah kepentingan kelompok akan merugikan orang banyak, membenarkan perilaku yang salah, bahkan dapat merubah seorang manusia menjadi seekor manusia agar segala kepentingan yang dapat terpenuhi. Dengan memahami sejarah kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, Karen tupai pun tak pernah terjatuh pada lubang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin Kuno. 2009. Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif Jakarta Paska Soeharto: Yogyakarta Ombak.
2. Akhmad Muawal Hasan. 2018. Keluar dari Eksremisme: Delapan Kisah Hijrah Dari Kekerasan Menuju Binadamai: PUSAD Paramadia.
3. @Rossi. Talkshow. 2017. Belajar damai dari Maluku: Kompas TV.
4. Eryanto. 2016. Media dan Konflik Maluku: PT Sembarani akra nusanantara.
5. Fachry Ali. 1996. Golongan agama dan etika kekuasaan: Risalah Gusti Surabaya.
6. Lestari. 2013. Pengelolaan Konflik Di Indonesia. Pdf: komunikasi Multikulral.
7. [://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktorpenyebabnya](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktorpenyebabnya). diakses pada 16 Januari 2017.
8. [http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences-Sociology/22059336-Pengertian-Pelaksanaan -Actuating](http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences-Sociology/22059336-Pengertian-Pelaksanaan-Actuating).
9. Idhamsyah dan Ardiningtiyas. 2012. Psikologi Prasangka (Sebab, Dampak, Dan Solusi). Bogor: Ghalia Indonesia.
10. Jusmaliani dan Muhammad Soekarni. 2005. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam: Kreasi Wacana Yogyakarta.
11. Koentjaraningrat. 1982. Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES Jakarta.
12. Leo Agustino. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Alfabeta,cv.
13. M. Tahir Sapsuha. 2013. Pendidikan Pasca Konflik: LKIS Yogyakarta.
14. Nana Staudih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
15. Pruiit Dean G. Jeffrey Z. Rubin 2009. Teori Konflik Sosial: yogyakarta Pustaka Pelajar.
16. Patrik, Purnawahid. 1988. Hukum Perdata II. Undip: Semarang.
17. Ritzer. Goerge dan Douglas. J. Goodman. 2008. Teori Kontemporer. Jakarta: Kencana.
18. Soejono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
19. Soetomo. 1995. Masalah Sosial Dan Pembangunan. Jakarta: Dunia Putaka Jaya.
20. Subekti. R. 1991. Hukum Perjanjian Irtemasa. Jakarta.
21. Setiawan. R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikanan. Bina Cipta: Bandung.

22. Samuel Waileruny. 2011. Membokar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
23. Tim Penyusunan Monografi Daerah Maluku. Mografi Daerah Maluku. Proyek pengembangan Media Kebudayaan. DITJEN. Kebudayaan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
24. Vovri Susan. 2009. Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer jakrata: Kencana Prenada Media Group.
25. Wijono. Sutarta. 2012. Spikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: Kencana.







LEMBAR KONSULTASI

KONFLIK MALUKU DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO
1999-2002

Nama : Jumidi Elwahan
NIM : 11515A0005T
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Dosen Pembimbing : 1. Ahmad Afandi, SS., M.Pd
2. Ilmiawan Mubin, M.Pd

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Pembimbing		Ket
			I	II	
3.	Sabtu, 16-02-2019	- Ruang sub yang dite serai day pelisa Masih kreatif saya yg sama di pembimbing yang belum berubah			J. Rivin
4.	Senin, 18-02-2019	- Bab V tentang kesimpulan, deskrip sikan kutipari dan hasil penulisan yg. Belum di buat skripsi yg.			J. Rivin 18-02-2019



LEMBAR KONSULTASI

KONFLIK MALUKU DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO
1999-2002

Nama : Jumidi Elwahan
NIM : 11515A0005T
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Dosen Pembimbing : 1. Ahmad Afandi, SS., M.Pd
2. Ilmiawan Mubin, M.Pd

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Pembimbing		Ket
			I	II	
-	selesai 12-03-2019	- Perbaiki bab V dan daftar pustaka - lampiran			
-	selesai 19-03-2019	A@ selesai daftar ujian			